

BAB VI

DINAMIKA PROSES PERENCANAAN

A. Proses Diskusi Menelusuri Masalah Bersama Perempuan

Dari hasil diskusi permasalahan yang telah dilakukan dengan masyarakat Wonosari Wetan beserta para pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 pukul 19.30 di Balai Wonosari yang mana diskusi tersebut difasilitasi dari tim Pendamping. Hasil diskusi tersebut menjadikan terkumpulnya berbagai masalah yang telah diungkapkan dan dibahas bersama. Adapun masalah-masalah yang diungkapkan masyarakat diantaranya : 1) Kurangnya kesadaran tentang kesehatan, 2) Bertumpu pada kegiatan ekonomi yang rendah, 3) Kontelasi kuasa dan agama, 4) Pendidikan dan paradigma masyarakat.

Dalam proses diskusi tersebut, sebagian besar pemikiran masyarakat Wonosari Wetan tertuju pada bidang ekonomi dan kesehatan. Pada diskusi yang dihadiri oleh perangkat kampung serta anggota karang taruna tersebut, tercuat sebuah masalah yang secara tersirat muncul di Wonosari Wetan. Perlahan-lahan namun pasti. Pendidikan agama yang hanya diajarkan di Sekolah Dasar ternyata belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama anak-anak Wonosari Wetan.

Di Wonosari Wetan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya sendiri sebenarnya sudah ada lembaga pos kesehatan dan lembaga koperasi kecil-kecil yang menangani jika ada warga yang ingin periksa. Sebuah pos kesehatan darurat yang bertempat di Balai RW VII, Wonosari Wetan, menjadi satu-satunya lembaga kesehatan nonformal yang ada selain di puskesmas. Namun, keberadaannya yang tunggal itu tidak bisa menjadikan pos kesehatan tersebut bekerja secara maksimal.

Dengan tercuatnya masalah tersebut, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan diskusi dengan para masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan, hambatan, serta masalah yang dialami lembaga ekonomi dan pos kesehatan. Dalam diskusi tersebut. Beberapa masalah yang diungkapkan masyarakat adalah :1) tidak adanya relawan yang menjaga, 2) tidak ada mendirikan lembaga ekonomi, 3) tidak ada sistem administrasi yang baik, 4) tidak ada bisyaroh maupun donasi untuk lembaga ekonomi.

Sebuah masalah yang terkait dengan ekonomi konvensional adalah definisi dari nilai dalam pengertian produktivitas ekonomis atau harga pasar. Bahwa tidak adanya pengakuan atas fenomena sosial dan ekonomi, faktanya ia berfungsi memperkuat orde, yang ada saat ini, yang bersifat merusak secara ekologis dan sosial. Dari hasil kajian menunjukkan sebagian besar dari masyarakat lebih memilih kegiatan berdagang dalam kondisi pengembangan arboretum yang sudah mapan dengan tingkat kunjungan yang tinggi. Padahal keinginan usaha dalam

bidang perdagangan atau jasa ini belum memungkinkan pada fase awal. Pilihan usaha lainnya juga termasuk keinginan masyarakat untuk menjadi pekerja di dalam kegiatan pengembangan arboretum. Dalam pengembangan di kawasan Wonosari Wetan sebaiknya dengan mempertimbangkan tahapan yang kongkrit dan fleksibel. Diawali dengan mempersiapkan masyarakat dengan program sosialisasi yang tepat sehingga bisa diterima khususnya oleh masyarakat setempat.

Gambar 6.1

Proses diskusi bersama masyarakat Wonosari Wetan



Gambar 6.2*Foto Diskusi Pemetaan Awal*

Dalam proses diskusi tersebut, sebagian besar pemikiran masyarakat Wonosari Wetan tertuju pada bidang ekonomi dan kesehatan. Pada diskusi yang dihadiri oleh perangkat desa serta anggota karang taruna tersebut, tercuat sebuah masalah yang secara tersirat muncul di Wonosari Wetan. Perlahan-lahan namun pasti.

Dengan tercuatnya masalah tersebut, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan diskusi dengan para masyarakat dan relawan yang dahulu mejaga lembaga tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan, hambatan, serta masalah yang dialami masyarakat mengenai kondisi ekonomi yang mereka alami. Dalam diskusi tersebut. Beberapa masalah yang diungkapkan masyarakat adalah

:1) tidak adanya relawan yang menjaga pos kesehatan, 2) tidak ada yang membuka lembaga ekonomi, 3) tidak ada sistem administrasi yang baik, 4) tidak ada bisyaroh maupun donasi untuk lembaga ekonomi dan pos kesehatan.

Di wilayah kota besar seperti Surabaya, kemiskinan sesungguhnya adalah fenomena social yang kontradiktif. Di balik pertumbuhan kota yang makin berkembang menjadi daerah industry yang meraksasa, ternyata acapkali terselip kehidupan masyarakat yang termaginalisasi dan miskin akibat tak mampu bersaing dalam kerasnya kehidupan kota. Di sela-sela gedung yang menjulang dan perkembangan berbagai pusat perbelanjaan super mewah, ternyata di sana dengan mudah menjumpai rumah-rumah petak, permukiman kumuh permukiman liar yang dihuni penduduk miskin kota.

Bagi keluarga miskin, kendala utama yang acapkali menghambat kemungkinan mereka untuk mengembangkan diri tak pelak adalah kualitas sumber daya manusia yang umumnya rendah, kurang berpendidikan dan tidak didukung penguasaan keterampilan yang memadai. Sebagian besar penduduk miskin umumnya hanya menguasai keterampilan yang tergolong pekerjaan kasar dan bersifat informal. Mereka umumnya sulit dapat terserap di sector perekonomian firma yang mensyaratkan keahlian dan ijazah pendidikan tinggi. Dengan segala keterbatasannya, penduduk miskin lebih banyak bekerja di sector informal dengan upah yang tidak menentu.

Meneruskan sekolah hingga jenjang setinggi-tingginya, untuk bisa menjadi sarjana bagi keluarga miskin seringkali sulit dan bahkan nyaris mustahil untuk dilakukan karena keterbatasan ekonomi dan keterbatasan pengetahuan mereka. Di kalangan keluarga miskin, sudah lazim terjadi anak-anak mereka putus sekolah di tengah jalan, karena harus membantu orang tuanya untuk mencari nafkah. Sekolah dan bekerja, bagi anak-anak seringkali menjadi beban ganda yang terlampau berat untuk ditanggung di waktu yang bersamaan, sehingga ketika dihadapkan pada situasi yang sulit, maka pilihan pun harus segera diambil. Berhenti sekolah, dan kemudian mencari kerja, meski sebetulnya tidak dikehendaki, tetapi menjadi pilihan satu-satunya yang tersisa karena kebutuhan hidup yang tidak mungkin lagi ditunda. Di tengah kondisi di mana sarjana pun diketahui banyak yang masih menganggur dan sekolah ternyata bukan jaminan akan dapat merubah masa depan yang baik, maka bisa dipahami jika para orang tua dari keluarga miskin kemudian agak bersikap pesimis dan bahkan mengalami krisis kepercayaan terhadap arti penting sekolah.

Memang kalau berbicara idealnya, semua keluarga miskin yang diteliti sebetulnya sudah paham sepenuhnya apa yang dimaksud “empat sehat lima sempurna”, artinya mereka paham benar bagaimana dan apa yang harus dikonsumsi untuk dapat hidup secara sehat, mulai dari soal kecukupan protein, vitamin, telur, daging, sayur dan buah. Tetapi, masalahnya bagi keluarga miskin bukanlah apa mereka tahu atau tidak bagaimana cara agar

dapat hidup dengan sehat. Jangankan berbicara apakah makanan yang mereka konsumsi bergizi atau tidak, untuk sekadar kenyang dan bisa memenuhi kebutuhan pangan secara layak karena tekanan kemiskinan dan kerentanan yang semakin kronis.

Di kalangan keluarga miskin di Wonokusumo khususnya kampung Wonosari Wetan, studi ini menemukan salah satu kebiasaan keluarga miskin yang kontra-produktif bagi upaya pemenuhan pangan dan gizi anak adalah kebiasaan merokok dan ngopi yang acapkali dilakukan orang tua. Tidak sedikit keluarga miskin khususnya orang tua yang tanpa sadar beranggapan bahwa merokok dan ngopi cenderung dianggap lebih penting dari pada pemenuhan gizi keluarga.

Salah satu kebutuhan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan modal usahanya adalah dukungan sumber daya finansial yang memadai, murah dan mudah diakses. Tetapi, kenyataan yang ditemui di lapangan memperlihatkan bahwa sumber permodalan yang bisa diakses keluarga miskin umumnya bersifat informal, dan cenderung membebani dengan suku bunga yang tinggi biasa disebut dengan bank thithil. Di lingkungan perkotaan di mana hubungan antar orang cenderung makin kontraktual dan komersial, mencari dukungan sumber daya finansial yang murah bagi keluarga miskin tampaknya makin mustahil dapat ditemukan. Bank thithil yang dengan mudah memberi tawaran pinjaman itu, sebetulnya mereka ibaratnya seperti menanamkan bom waktu yang

suatu saat pasti meledak dan memporak-porandakan kehidupan makin ke arah yang makin sengsara. Tetapi, ketika pilihan tidak lagi ada yang tersisa, dan kebutuhan tidak lagi bisa ditunda, maka tanpa bisa mengelak utang pun terpaksa harus diambil meskipun beban bunga yang harus dibayar sangat tidak masuk akal.

Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan mengapus kemiskinan, antara lain merumuskan standar garis kemiskinan dan menyusun kantong-kantong kemiskinan. Diluar itu, tak sedikit program yang telah disusun dan dilaksanakan dilapangan, seperti terus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat miskin antara lain melalui pemberian bantuan dana, dan lain-lain. Membangun infrastruktur di permukiman kumuh, pengembangan model pembangunan kawasan terpadu, termasuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas program pembangunan.

Di samping itu, faktor lain yang menyebabkan berbagai program pengentasan kemiskinan menjadi kurang efektif tampaknya adalah berkaitan dengan kurangnya dibangun ruang gerak yang memadai bagi masyarakat miskin itu sendiri untuk memberdayakan dirinya. Acap terjadi, kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan penduduk miskin justru terjebak menjadi program yang melahirkan ketergantungan baru, dan bahkan mematikan potensi swakarsa lokal.

Selama ini, pendekatan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan baik di tingkat nasional, regional maupun lokal umumnya adalah dengan menerapkan pendekatan ekonomi semata, yang seringkali kurang mengabaikan peran kebudayaan dan konteks lokal masyarakat. Ada kesan kuat bahwa di mata pemerintah masalah kemiskinan sepertinya hanya dipahami sebagai sebuah persoalan kekurangan pendapatan. Sangat kelihatan pula di berbagai program yang dilaksanakan pemerintah umumnya hanya berusaha memberikan bantuan di bidang permodalan, memberikan subsidi, dan semacamnya. Kendati secara harfiah nama berbagai program pengentasan kemiskinan berbeda-beda, tetapi substansinya sesungguhnya hampir sama, yakni memberikan aliran modal kepada masyarakat miskin dan meminta mereka bekerja lebih keras untuk memberdayakan dirinya sendiri.

Lekatan permasalahan tersebut harus segera diurai dan dicari benang merah permasalahannya. Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah terjadi dan menggunkung masyarakat Wonokusumo, pada uraian ini akan ditunjukkan beberapa aksi yang dilakukan oleh tim pendamping sebagai langkah awal untuk mengurai permasalahan-permasalahan yang telah melekat dan membelenggu masyarakat Wonokusumo

Penguraian dan pengungkapan permasalahan ini dilakukan oleh sekelompok tim yang memang ditugaskan untuk mencari data dan mengungkapkan berbagai permasalahan yang telah menggunkung masyarakat Wonokusumo. Dalam rangka untuk mendapatkan data serta

pengungkapan berbagai permasalahan di Wonokusumo, tim peneliti dan masyarakat melakukan beberapa teknik, di antaranya melakukan wawancara selama beberapa hari dan melakukan FGD (Focus Group Discussion). Selain itu tim fasilitator juga melakukan transek atau penelusuran wilayah didampingi oleh NSL (Nara Sumber Langsung) bernama bapak Sukidi, Ibu Darmaji, Ibu Ngadiani dan Ibu Iswati, serta beberapa warga Wonokusumo.

Tabel 6.1
KERANGKA PERENCANAAN PROGRAM LOGICAL
FRAMEWORK APPROACH

Deskripsi Projek	Indikator	Means Of Verification	Asumsi dan Resiko
Tujuan : Mediasi untuk membahas masalah masyarakat Wonokusumo	1. Masyarakat Wonokusumo dapat menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan memotong	1. Terbentuknya sistem baru guna memotong mata rantai rentenir lokal 2. Terbentuknya kelembagaan baru dalam masyarakat yang berbasis	

	<p>mata rantai rentenir lokal</p> <p>2. Masyarakat Wonokusumo dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui pembinaan dan pendidikan alternatif berbasis koperasi.</p>	<p>kemasyarakatan</p>	
<p>Outcomes:</p> <p>Terjalinnnya kerjasama masyarakat dalam menyelesaikan isu-isu strategis dalam masyarakat.</p>	<p>Terbentuknya komitmen bersama dalam masyarakat</p>	<p>Adanya kesepakatan dalam membentuk kelembagaan berdasarkan kebutuhan masyarakat</p>	<p>Adanya intervensi dari oknum pemerintah agar kegiatan ini tidak terselenggara dengan baik.</p>

<p>Component Objective:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stakeholder Pendidikan 2. Stakeholder Ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dengan pemerintah lokal dan instansi yang terkait dengan pembinaan yang berkenaan dengan masyarakat Wonokusumo o 2. Kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dengan peningkatan pendidikan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Organisasi Kemasyarak 	<p>Terbentuknya kerjasama sehingga mampu membentuk <i>snowballing system</i> dalam pelaksanaan program pemberdayaan</p>	
---	---	---	--

	atan yang independen.		
<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki 2. Tersedianya kerjasama masyarakat dalam menyelesaikan persoalan ekonomi akibat dominasi kemiskinan struktural 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya sumber daya manusia dari tingkat yang paling kecil yakni anak-anak dan perempuan 2. Bangkitnya usaha kecil masyarakat yang sempat vakum 	<p>Terbentuknya sistem kelembagaan berdasar kemasyarakatan</p>	
<p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibentuknya koperasisebagai lembaga 	<p>Hilangnya kotak-kotak masyarakat</p>	<p>Meningkatnya kapasitas kelembagaan</p>	

<p>alternatif dalam meningkatkan dan menghimpun sumberdaya masyarakat Wonokusumo.</p> <p>2. Dibentuknya kelembagaan ekonomi alternatif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat</p>	<p>yang terbentuk dari adanya kesenjangan sehingga masyarakat dapat menyelesaikan isu-isu strategis</p>	<p>masyarakat dalam mengelola dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat</p>	
---	---	--	--

B. Proses Diskusi Menelusuri Masalah Bersama Perempuan

Dalam pelaksanaan program yang bermula dari keluhan dan curahan hati masyarakat Wonosari Wetan ini, terdapat beberapa hal yang menjadi batu kerikil terlaksananya program ini, diantaranya :

Wonoari Wetan mempunyai pemuka agama yang selalu menjadi pemimpin dalam bidang keagamaan. Secara otomatis pemuka agama ini juga yang selalu mengkoordinasikan segala kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya di Wonosari Wetan. Seperti kegiatan tahlilan, maulid Nabi, serta kegiatan bagi ibu-ibu muslimat. Dan tidak dipungkiri bahwa pemuka

agama yang biasa dipanggil ustadz ini juga turut memegang peran dalam jalannya lembaga di Wonosari Wetan.

Dengan adanya masalah mengenai kemiskinan di Wonosari Wetan, maka peneliti berinisiatif untuk membenahi jalannya proses pendirian lembaga ekonomi di kampung tersebut. Namun, terdapat silang pendapat antara usulan ini dengan pemahaman tokoh masyarakat. Pemahaman tersebut berkaitan dengan konflik internal yang terjadi di masa silam. Dimana merupakan konflik politik antar pemimpin kampung. Jika problematika ini dibiarkan terus ke dalam kehidupan masyarakat, tentu saja dapat mempengaruhi kekuatan aset manusia dan aset sosial yang dapat menurun bahkan menghilang. Maka diperlukan adanya langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan ini tanpa harus menyentuh ranah-*ranah sensitif* masyarakat. Sehingga tim pun tidak terlibat dalam konflik yang ada di masyarakat justru malah menjadi mediator yang dapat mempersatukan masyarakat.

C. Proses Perencanaan Bersama Masyarakat

Dalam menjalankan program ini, dibutuhkan manajemen infrastruktur yang baik demi menunjang keberhasilan proses pembuatan lembaga ekonomi beserta menciptakan *local leader*. Salah satu infrastruktur yang dibutuhkan adalah gedung untuk proses lembaga ekonomi. Secara tidak sengaja di lingkungan Wonosari Wetan, terdapat sebuah gedung yang tidak terpakai. Peneliti bersama masyarakat berinisiatif mengembalikan fungsi gedung yang sebelumnya memang digunakan sebagai tempat proses belajar

mengajar agama. Namun, keadaan gedung tersebut membutuhkan pembenahan untuk menunjang kegiatan lembaga ekonomi. Sehingga lembaga ekonomi yang didirikan itu bermitra dengan suatu kelompok ekonomi yang ada di suarabaya salah satunya adalah APEKMAS yang kantor pusatnya berada di Darmo Trade Center (DTC).

Gambar 6.3

Foto Lembaga APEKMAS



1. Keterbatasan Dana dalam Pembuatan Fisik dan Nonfisik Lembaga Ekonomi

Melihat dari pendapatan dan pemahaman ekonomi warga Wonosari Wetan, dalam proses pembenahan gedung mengalami hambatan. Diantaranya tidak tersedianya donasi dari masyarakat maupun dari pihak pemerintahan setempat. Kemudian peneliti mengumpulkan dana secara mandiri untuk proses pembenahan gedung bersama masyarakat.

2. Rendahnya Kesadaran Orangtua Terhadap Pendidikan.

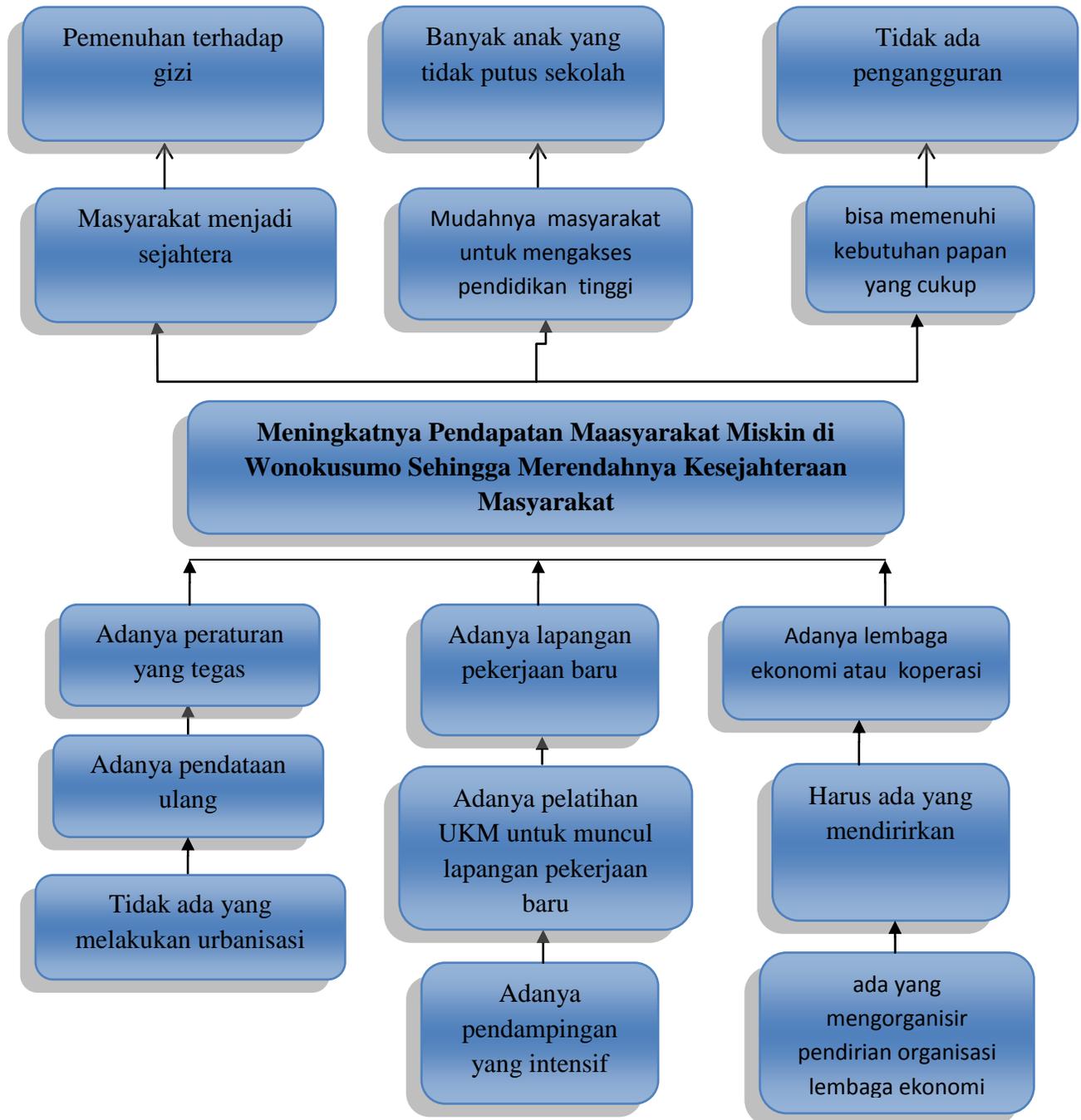
Dengan melihat latar belakang pendidikan orang tua yang mayoritas kurang memahami pentingnya pendidikan bagi kehidupan sehari-hari, menyebabkan program ini sedikit terhambat dalam pelaksanaannya. Untuk itu, dilaksanakan sebuah forum diskusi bersama semua orang tua demi kelancaran program ini.

Dari adanya faktor pendorong dan penghambat diatas, maka harapan yang diinginkan oleh masyarakat Wonosari Wetan adalah agar lembaga ekonomi berupa koperasi dan UKM-UKM ini aktif kembali. Harapan tersebut dapat digambarkan melalui pohon harapan seperti di bawah ini.

Dari realitas penyebab dan akibat permasalahan kesejahteraan masyarakat miskin di Wonosari Wetan, maka harapan yang diinginkan oleh masyarakat agar kesejahteraan masyarakat miskin bisa teratasi adalah seperti dalam pohon harapan berikut ini.

Bagan 6.1

Pohon Harapan kesejahteraan Wonosari Wetan



Untuk melangsungkan kehidupan dan bertahan dari tekanan kemiskinan yang dihadapinya, berbagai keluarga miskin umumnya akan mengembangkan strategi dan pilihan cara yang berbeda-beda satu dengan yang lain, meski tujuannya sama. Mencegah agar kehidupan tidak makin terpuruk adalah strategi yang dicoba dikembangkan keluarga miskin tatkala mereka menghadapi musibah atau tekanan kemiskinan yang makin kronis. Mendayagunakan anak sebagai sumber penghasilan keluarga melakukan penghematan uang, utang dan beradaptasi dengan situasi kemiskinanan adalah strategi yang acapkali dikembangkan keluarga miskin untuk menyasati. Sebetulnya tidak banyak harapan dan peluang yang tersisa bagi keluarga miskin untuk dapat memperbaiki taraf kehidupannya. Tetapi, sekecil apapun peluang dan harapan yang timbul, bagaimanapun akan dapat menjadi pijakan awal bagi keluarga miskin untuk menyasati situasi dan kemudian menembus sekat-sekat struktur kelas yang makin rigid untuk melakukan mobilitas vertical.

Meski nyaris semua keluarga miskin yang diteliti menyatakan pesimis atau bahkan apatis dalam menhadapi tantangan kehidupan, tetapi sesungguhnya di benak mereka masih tersisa harapan dan keinginan untuk merubah nasib. Hidup di bawah tekanan kemiskinan selama bertahun-tahun, bahkan hingga antar generasi sesungguhnya bisa dipahami jika membuat keluarga miskin pada akhirnya pasrah menerima nasib. Kalaupun kemudian timbul keinginan untuk berubah di sebagian keluarga miskin itu, yang diharapkan umumnya adalah perubahan yang datang dari luar. Kondisi perekonomian yang

kembali baik dan intervensi program dari pemerintah yang makin intensif adalah harapan yang acapkali dikemukakan informan yang berharap kondisi kemiskinan dan kesengsaraan mereka bisa tertanggulangi.

Di tengah segala keterbatasan, ketidakberdayaan dan kekurangan akses keluarga miskin pada sumber-sumber produksi, memang sulit diharapkan keluarga miskin akan dapat melakukan perbaikan dengan kekuatan mereka sendiri. Di kalangan keluarga miskin, satu-satunya harapan yang masih mungkin adalah anak-anak mereka secara umum, keluarga miskin yang diteliti berkeinginan kehidupan dimasa depan anak-anaknya akan dapat lebih baik dari apa yang tengah mereka alami. Jika Pemerintah Kota Surabaya bersedia menawarkan dan meningkatkan layanan public, khususnya di bidang pelayanan administrasi kependudukan, mulai dari KTP, KSK, Akte kelahiran, biaya pendidikan yang murah dan gratis, menurut keluarga miskin hal itu benar-benar akan menjadi berkah tersendiri.

Tidak hanya itu saja tetapi adanya pendampingan khusus untuk mendirikan sebuah organisasi lembaga ekonomi atau koperasi benar-benar secara intensif supaya masyarakat bisa meringankan beban hidup mereka. Pendirian koperasi sangat membantu keluarga miskin di Wonosari Wetan karena selama ini disini masih belum ada. Dengan seperti itu semua masyarakat Wonosari Wetan bisa berdaya dan bisa mengembangkan usahanya.

D. Menjalिन Kerjasama dengan Stakeholder

Dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh tim bersama masyarakat tentu membutuhkan pihak-pihak terkait yang bergerak sebagai motor penggerak dan memonitoring pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, sehingga proses yang dibentuk dengan peran serta masyarakat dapat berjalan kontinu atau terus menerus dan semakin berkembang. Selain berperan sebagai motor penggerak, pihak-pihak stakeholder juga berperan dalam membentuk jaringan-jaringan sosial yang menyokong kemandirian masyarakat.

Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah pemerintah lokal sebagai pemegang otoritas terbesar di Wonokusumo, namun mengingat pemerintah Wonokusumo yang merupakan pusat dari kampung-kampung yang ada di wilayahnya termasuk Wonosari Wetan masih cenderung alot untuk diajak berembug menyusun pelaksanaan pembentukan UKM dan koperasi bagi perempuan-perempuan Wonosari Wetan, hal ini terbukti dengan masih enggannya pemerintah lokal untuk membantu pelaksanaan kegiatan ini. Maka Tim bersama masyarakat menjalin kerjasama hanya dengan Kepala Lurah saja. Meski begitu tim tetap menjadikan pemerintah lokal secara umum sebagai pelindung dari terselenggaranya proses pendampingan yang melibatkan peran serta masyarakat di dalamnya.

Disamping itu, peranan local leader juga menjadi tonggak keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Local leader dalam hal ini adalah Ibu Iswati, Bapak Sukidi, Ibu Ngadiani, Saudari Anis dan Ibu Sulastri yang merupakan tokoh-

tokoh yang cukup berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Wonokusumo. Peran mediator juga dianggap penting yang membantu menyatukan masyarakat. Dalam hal ini tim memerankan Koalisi Perempuan Indonesia sebagai mediator disamping peran tim sebagai fasilitator. Hal ini beralasan untuk menghindari konflik jika mediator diambil dari masyarakat sendiri. Selain itu memerankan Koalisi Perempuan Indonesia merupakan salah satu upaya untuk membangun jejaring yang akan menyokong proses kemandirian masyarakat itu sendiri.